



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram selama Tahun 2015 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, penyusunan Lakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebagai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan *good governance*.

LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram ini tidak terlepas dari kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun telah diupayakan semaksimal mungkin menyajikan secara lengkap dan menyeluruh segenap aspek yang menyangkut program kerja dari pelaku aktivitas, namun kami berharap data dan informasi yang tersaji dalam laporan ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan kegiatan dimasa yang akan datang.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

Semoga penyajian LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram ini dapat mencerminkan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun sehingga kinerja kedepan dapat lebih produktif, efektif dan efisien baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Mataram, Januari 2015

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
KOTA MATARAM**

**Drs. H. ABDUL LATIF NADJIB, MM
Pembina Tk.I
Nip. 19651231 199502 1 008**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ditetapkan 5 sasaran dengan 8 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

- **Sasaran pertama** terdiri dari 1 indikator kinerja
- **Sasaran kedua** terdiri dari 2 indikator kinerja
- **Sasaran ketiga** terdiri dari 2 indikator kinerja



- **Sasaran keempat** terdiri dari 2 indikator kinerja
- **Sasaran kelima** terdiri dari 1 indikator kinerja

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam skala ordinal yaitu prosentase n/a keterangan tidak ada target, prosentase < 100% keterangan tidak tercapai, prosentase = 100% keterangan tercapai, prosentase > 100% keterangan melebihi target.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Capaian pada **Sasaran 1** terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % katagori tercapai

Capaian pada **Sasaran 2** terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% Katagori tercapai

Capaian pada **Sasaran 3** terdiri dari 2 indikator dengan nilai 93,41% Katagori tidak tercapai

Capaian pada **Sasaran 4** terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00% Katagori tercapai

Capaian pada **Sasaran 5** terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00% Katagori tercapai



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
1.2.1. Gambaran Umum	1
1.2.2. Kelembagaan	3
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Sistematika Penyusunan	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
2.1. Rencana Strategik	4
2.2. Perjanjian	4
BAB III AKUNTABILITASI KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja	9
3.2. Pengukuran Kinerja	11
3.3. Evaluasi dan Analisis	15
3.4. Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	1.1	Angka Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram 5 Tahun Terakhir
Tabel	1.2	Data jumlah Rumah makan, Biro perjalanan, Event organizer, salon, usaha jasa lainnya, hiburan umum lainnya 2013 s/ d 2015
Tabel	1.3	Data jumlah hotel yang ada di Kota Mataram Tahun 2015
Tabel	1.2.1	Anggaran Tahun 2015
Tabel	2.1.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan
Tabel	2.1.2	Indikator Kinerja Utama
Tabel	2.1.3	Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Tabel	2.2.1	Perjanjian Kinerja
Tabel	3.1.1	Capaian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Renstra 2011-2015
Tabel	3.1.2	Capaian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Renstra 2011-2015
Tabel	3.1.2.	Capaian Kinerja Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tabel	3.2.1.	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015
Tabel	3.2.2.	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015
Tabel	3.2.3.	Pencapaian Target Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015
Tabel	3.2.4.	Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2015



Tabel	3.2.5.	Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya Tahun 2014
Tabel	3.3.1	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Lestarinya Bangunan Cagar Budaya
Tabel	3.3.2	Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran
Tabel	3.3.3.	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Berkembangnya Seni Budaya Daerah
Tabel	3.3.4	Data Cakupan Gelar Seni dan Budaya
Tabel	3.3.5	Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran
Tabel	3.3.6.	Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
Tabel	3.3.7	Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran
Tabel	3.3.8.	Analisis Pencapaian Sasaran 4 Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata
Tabel	3.3.9.	Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran
Tabel	3.3.10	Analisis Pencapaian Sasaran 5 Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata
Tabel	3.3.11.	Jumlah Destinasi Wisata
Tabel	3.3.12	Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran
Tabel	3.4.1	Realisasi keuangan menurut Program/Kegiatan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tabel	3.4.2.	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan berdasarkan hukum sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kota Mataram terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur



penyelenggara pemerintahan negara mulai eselon II keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bentuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diharapkan dengan adanya Indikator Kinerja Utama, maka setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah secara berkala mampu meningkatkan kinerjanya sesuai indikator kinerja masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh SKPD adalah untuk mewujudkan akuntabilitas SKPD kepada pihak yang memberi mandat/ amanah. Atau dengan kata lain LAKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk mengkomunikasikan tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses



pencapaiannya dalam kaitannya dengan mandat atau tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Adapun manfaat LAKIP bagi SKPD adalah untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas. Hal ini juga akan memberi pengaruh terhadap kredibilitas SKPD yang bersangkutan ; semakin akuntabel LAKIP SKPD maka semakin kredibel SKPD tersebut.
2. Umpan balik untuk meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan, yang dapat dilakukan melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan kinerja hingga ada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas pada lingkungan kerja SKPD.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Media Akuntabilitas, merupakan bentuk perwujudan kewajiban pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemberi wewenang atas penggunaan anggaran dalam berbagai program/ kegiatan yang telah dilaksanakan. Media evaluasi dalam kaitannya dengan fokus perbaikan kinerja secara berkesinambungan yang harus dilakukan pada masa yang akan datang.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah melaksanakan Misi pertama Pembangunan Kota Mataram yaitu ***“Mewujudkan Masyarakat Perkotaan yang “AMAN” ditunjukan dengan stabilitas yang kondusif,saling berterima,dalam suasana lingkungan yang***



bersih dan Indah untuk mencapai masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya” sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dibidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram tahun 2015.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KEBUDYAAAN DAN PARIWISATA

1.2.1 Gambaran Umum

Kota Mataram merupakan Salah Satu Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana letaknya diapit oleh Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08o 33’ dan 08o 38’ Lintang Selatan dan antara 116o 04’ - 116o 10’ Bujur Timur. Dimana Luas Kota Mataram adalah 61,30 Km². Dibagi dalam 6 (enam) Kecamatan dan 50 (lima puluh) Kelurahan.

Sebagai Ibu Kota Propinsi keberadaan Kota Mataram menjadikannya sebagai pusat Perekonomian, Pemerintahan, Pendidikan dan Sebagai penghubung antara Kabupaten dan propinsi, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Kota Mataram menjadi Kota Pariwisata.

Suku Sasak merupakan suku asli sekaligus suku bangsa mayoritas penduduk Kota Mataram. Dimana selain Suku Sasak masih banyak juga suku bangsa Indonesia yang mendiami Kota Mataram antara lain Suku Bali, Suku Samawa, Suku Jawa, Tionghoa dan Arab. Kehidupan antar suku di Kota Mataram



dapat dikatakan terjalin dengan baik dan rukun serta dalam suasana Kekeluargaan.

Islam adalah mayoritas Penduduk Mataram, dimana selain islam agama yang lain yang ada kedua setelah islam adalah Hindu, dan setelah itu Kristen, Katolik, Budha dan Kong Hu Cu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Kota Mataram Kerukunan umat beragama sangatlah terjaga serta saling menghormati, saling menghargai dan tolong menolong tetap diterapkan di kehidupan bermasyarakat di Kota Mataram, Dimana ini Sesuai dengan Visi Kota Mataram yang “*Maju, Religius dan Berbudaya*”

Kota Mataram Sebagai Kota Penghubung antara Propinsi dan Kabupaten lainnya yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat memberikan efek yang positif bagi Tingkat Kunjungan Wisatawan yang berbasis MICE (Meating, Confrence, and Event). Dimana Banyak Kegiatan yang berbasis MICE dilaksanakan di Kota Mataram. Sehingga Angka Kunjungan yang ada selama 5 tahun dapat dilihat berikut ini :

Tabel 1.1
Angka Kunjungan Wisatawan yang berkunjung ke Kota Mataram 5 Tahun Terakhir

TAHUN	KUNJUNGAN WISATAWAN		TOTAL
	WISMAN	WISNU	
2010	4.948	213.923	218.871
2011	7.661	223.588	231.249
2012	9.442	285.249	294.691
2013	8.765	392.272	401.037
2014	9.463	419.862	429.325
2015	5.105	162.235	368.995

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015

Untuk mendukung pengembangan pariwisata Kota Mataram perlu adanya sarana pendukung baik berupa destinasi sebagai tempat kunjungan para wisatawan maupun sarana yang lain seperti Hotel, Restoran, Biro Perjalanan ataupun Tempat Hiburan lainnya.

Tabel 1.2
Data jumlah Rumah makan, Biro perjalanan, Event organizer, salon, usaha jasa lainnya, hiburan umum lainnya 2013 s/ d 2015

NO	URAIAN	2013	2014	2015
1.	Rumah Makan/Resto	206	211	211
2.	Biro Perjalanan	245	253	253
3.	Event Orgenaizer	42	42	42
4.	Salon	116	116	116
5.	Rumah Bernyanyi	3	6	6
6.	Usaha Jasa Lainnya	5	4	4
7.	Hiburan Umum Lainnya	26	28	28

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015

Tabel 1.3
Data jumlah hotel yang ada di Kota Mataram Tahun 2015

NO	JENIS HOTEL	2013	2014	2015
1.	Hotel Berbintang	9	12	13
2.	Hotel Non Bintang	84	87	95
	Total Keseluruhan	93	99	108

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015

1.2.2 Kelembagaan

Berawal pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram bernama Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Mataram.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah tentang pembentukan organisasi perangkat daerah di kota mataram.

Pada tahun 2008 dibentuklah / berubah nama menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomer 5 Tahun 2008, Tanggal 25 Juni 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

1.2.2.1 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomer 5 Tahun 2008, Tanggal 25 Juni 2008.

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Bina Kebudayaan, membawahi :
 - Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi
 - Seksi Kesenian dan Perfileman
 - Seksi Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
4. Bidang Bina Kepariwisata, membawahi :
 - Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran



- Seksi Pemberdayaan SDM dan Standarisasi Kepariwisata
5. Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, Membawahi:
- Seksi Perijinan Kepariwisata.
 - Seksi Informasi dan Pengembangan Kepariwisata.
 - Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris, Sub bagian, Sub bidang dan Seksi – seksi sebagai mana tersebut masing-masing dipimpin oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dapat digambarkan sebagai berikut :

1.2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, disebutkan bahwa tugas pokok tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah



Tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/PERTA/2008 tanggal 8 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah;
- e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan atau swasta;



- g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta kepegawaian.

Adapun fungsi Sekretaris adalah :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;



- c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Dinas;
- d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
- e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
- h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut :

- (1) **Sub Bagian Perencanaan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengkoordinasian perencanaan dan, pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Ilingkup Dinas;



- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;
- e. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas ;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan keuangan lingkup Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan ;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas ;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas ;
- f. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
- b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
- d. Pengumpulan , pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan;
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Bina Kebudayaan

Bidang Bina Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan Bina Kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Bina Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan Program Kerja dan Penetapan Kinerja Bidang.
2. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi dibawahnya.
3. Perumusan Kebijakan teknis Dibidang Bina kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Bimbingan Tehnis Dibidang Bina Kebudayaan.
5. Pelaksanaan Koordinasi, Informasi dan Sinkronisasi Perangkat kerja Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksana program/kegiatan Dibidang Bina Kebudayaan.
6. Perumusan dan Penjabaran Pedoman, Norma, Standar Prosudur dan Kriteria Dibidang Bina Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengkoordinasian Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Bina Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Dibidang Bina Kebudayaan sebagai bahan penusunan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan.
9. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis Dibidang Bina Kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi / Lembaga terkait pemberian penghargaan kepada Budayawan dan Seniman yang telah berjasa / membina budaya daerah serta penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan dan pengayaan sejarah dan kepurbakalaan.
11. Pelaksanaan pasilitasi bantuan kepada kelompok/sanggar seni budaya dalam rangka Bina kebudayaan dan Pengembangan kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Bidang Bina Kepariwisataaan

Bidang Bina Kepariwisataaan dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan Bina Kepariwisataaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Bidang Bina Kepariwisataaan mempunyai fungsi :



1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
2. pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
3. perumusan kebijakan teknis bidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dibidang bina kepariwisataan;
5. Pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan dibidang bina kepariwisataan;
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria dibidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang bina kepariwisataan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan ;
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengembangan dan pembangunan obyek wisata di daerah ;

10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang bina kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelaksanaan fasilitasi bantuan untuk pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata dalam rangka pengembangan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisatan

Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis pelayanan bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Bidang Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
2. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya.



3. Perumusan kebijakan teknis dibidang perijinan ,pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
5. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.
6. Perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan bidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.
9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan.



10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang perijinan, pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang.
12. Pelaksanaan tugas tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2.2.3 KEPEGAWAIAN

Jumlah personil pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebanyak 57 orang dengan status kepegawaian terdiri dari :

- a. 30 orang PNS
- b. 1 orang Non PNS / Tenaga Honorer
- c. 3 orang Tenaga Supir
- d. 14 Orang Tenaga Kebersihan
- e. 9 Orang Penjaga Malam

Dari jumlah PNS sebanyak 30 orang tersebut dilihat dari segi kepangkatan terdiri dari :

1.	Golongan / Ruang	IV/c	=	1	Orang
2.	Golongan / Ruang	IV/b	=	1	Orang
3.	Golongan / Ruang	IV/a	=	3	Orang
4.	Golongan / Ruang	III/d	=	7	Orang
5.	Golongan / Ruang	III/c	=	2	Orang
6.	Golongan / Ruang	III/b	=	4	Orang
7.	Golongan / Ruang	III/a	=	1	Orang
8.	Golongan / Ruang	II/d	=	1	Orang



9. Golongan / Ruang	II/c	=	3	Orang
10. Golongan / Ruang	II/b	=	6	Orang
11. Golongan / Ruang	II/a	=	-	Orang
12. Golongan / Ruang	I/c	=	-	Orang

1.2.2.4 KEUANGAN

Alokasi APBD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung telah ditetapkan anggaran Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Anggaran Tahun 2015

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
TOTAL ANGGARAN DINAS	6.850.384.226
BTL	1.859.086.976
BL	4.991.297.250
TOTAL URUSAN	6.850.384.226
Urusan Kebudayaan	2.189.397.500
Urusan Kepariwisata	2.801.899.750

1.3 DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 13 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 16/PERT/2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.



1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Eksekutive Summary (Ringkasan Eksekutif)

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- 2.1 Perencanaan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- a. Analisis, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja
- b. Akuntabilitas Keuangan
- c. Kendala dan Solusi

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIK

Perencanaan Strategik adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada/timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram, menetapkan visi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Untuk mencapai visi dimaksud ditetapkan 5 (lima) Misi yaitu :

- a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang AMAN ditunjukkan dengan kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendorong daya saing daerah.
- c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan,
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Mataram, perlu didukung penetapan Visi dan Misi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing SKPD.



1. Visi dan Misi

a. Visi

Kompleksitas permasalahan/tantangan yang timbul sebagai konsekuensi logis di era globalisasi dan modernisasi memberi makna peningkatan persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima sehingga Instansi Pemerintah harus secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, komitmen aparatur terhadap terciptanya kondisi birokrasi yang handal dan professional. Perubahan paradigma ini dapat mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam upaya memperbaiki kinerja sektor publik.

Berdasarkan uraian diatas dan bertitik tolak pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, serta mengacu visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Mataram terutama misi pertama yaitu *“Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditujukan dengan stabilitas yang Kondusif saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan Indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya”*, maka dirumuskan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Mataram, yaitu ***“Terwujudnya Pariwisata Kota Mataram yang Berbasis Nilai Agama dan Budaya Menuju Masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya”***



b. Misi

Setelah ditetapkan Visi, maka dirumuskan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram sebagai berikut :

1. Penataan Data / Informasi tentang kebudayaan dan Pariwisata.
2. Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
3. Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
4. Peningkatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu aktual dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Pertama :

Penataan Data/Informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata sasaran antara lain :

- Menertibkan Perijinan Usaha Pariwisata.



- Pembinaan dan inventarisasi usaha jasa Pariwisata dan kebudayaan daerah.
- Aktualisasi Data dan Informasi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Kedua :

Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah, untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain :

- Melaksanakan dan mengikuti festival seni dan budaya di dalam maupun di luar daerah.
- Pembinaan dan bantuan dana pada sanggar seni dan kelompok budayawan.
- Pagelaran kesenian dan atraksi budaya dilakukan secara rutin dan berkala.
- Sosialisasi dan inventarisasi aset budaya dan benda cagar budaya.

c. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Ketiga :

Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain :

- Penataan ,pengembangan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata.
- Peningkatan dan Pengembangan sarana penunjang Obyek dan Daya Tarik Wisata.
- Pagelaran Kesenian dan atraksi budaya di Obyek Wisata.

d. Tujuan yang berhubungan dengan Misi ke Empat :

Peningkatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata untuk mencapai tujuan tersebut sasaran ditetapkan antara lain :



- Melaksanakan Promosi dengan mengikuti even – even promosi pariwisata didalam dan diluar Negeri.
- Penyuluhan dan penyebarluasan buku Sadar Wisata dan Sapta Pesona di beberapa kelurahan dan kecamatan di Kota Mataram dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata.
- Fasilitasi Produk – produk Pariwisata unggulan di Kota Mataram.

e. Tujuan yang berhubungan dengan Misi Kelima yaitu :

Peningkatan Penyelenggaraan Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan untuk mencapai tujuan sasaran tersebut yang ditetapkan antara lain :

- Melaksanakan pelatihan dibidang Kepariwisataan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap kebudayaan dan pariwisata.
- Meningkatkan kemitraan dengan pelaku Pariwisata.
- Menciptakan regulasi pembinaan dan pengawasan iklim usaha di bidang Pariwisata yang berbasis Sapta pesona.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram

1. Meningkatkan aktifitas kepariwisataan dengan mengembangkan dan pemampaan potensi-potensi wisata secara maksimal.
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana Destinasi pariwisata.
4. Meningkatkan Aktivitas promosi dan pemasaran pariwisata.
5. Pembinaan dan pengelolaan keragaman budaya daerah.



6. Menanamkan sikap sadar wisata dan sapta pesona bagi masyarakat dan pelaku wisata.

d. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

1. Pengumpulan data/informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala.
2. Pembinaan dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah
3. Peningkatan dan Pengembangan daya tarik Wisata dan Obyek Wisata
4. Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Untuk mencapai rangkaian strategi diatas, diharapkan arah kebijakan berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain :

1. Pengembangan kemudahan akses data/informasi Kebudayaan dan Pariwisata
2. Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan budaya daerah
3. Menyediakan sarana dan prasarana pada obyek dan daya tarik wisata
4. Meningkatkan Pemasaran pariwisata dengan meningkatkan SDM dalam pelayanan di bidang Kepariwisata



5. Membina hubungan yang baik antara Pemerintah dengan Pelaku Pariwisata.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pariwisata Kota Mataram yang Berbasis Nilai Agama dan Budaya Menuju Masyarakat yang Maju, Religius dan Berbudaya”			
MISI I : Penataan Data / Informasi tentang kebudayaan dan Pariwisata.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersediannya data/informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata	1.1 Penyusunan Data/Informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata	1.1.1 Pengumpulan data/informasi tentang Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala 1.1.2 Aktualisasi data dan informasi di bidang Kebudayaan & Pariwisata 1.1.3 Pembinaan dan Inventarisasi usaha jasa Pariwisata	1.1.1.1 Pengembangan kemudahan akses data/informasi Kebudayaan dan Pariwisata
MISI II : Peningkatan Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Aktualisasi Kesenian dan Budaya Daerah	1.1 Meningkatnya Pelestarian Kesenian dan Budaya Daerah	1.1.1 Melaksanakan dan mengikuti Festival Seni dan Budaya di dalam ataupun diluar daerah 1.1.2 Pembinaan dan Bantuan dana pada sanggar Seni 1.1.3 Pagelaran Kesenian dan Aktrasi Budaya dilakukan secara rutin dan berkala	1.1.1.1 Meningkatnya Pengembangan Kesenian dan budaya daerah 1.1.1.2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

		1.1.4	Sosialisasi dan Inventarisasi aset budaya dan benda cagar budaya	
Misi III : Peningkatan Pengembangan Destinasi Pariwisata				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Destinasi yang menarik bagi wisatawan	1.1 Meningkatkan Sarana dan Parasarana Destinasi Pariwisata	1.1.1	Penataan, pengembangan dan pemeliharaan obyek dan daya tarik wisata	1.1.1.1 Menyediakan obyek dan daya tarik wisata bagi wisatawan 1.1.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana pada obyek dan daya tarik wisata
		1.1.2	Peningkatan dan pengembangan sarana obyek dan daya tarik wisata	1.1.1.3 Menyediakan pagelaran kesenian dan aktualisasi budaya bagi wisatawan yang berkunjung pada obyek wisata
		1.1.3	Pegelaran Kesenian dan Aktrasi budaya di obyek wisata	
Misi IV : Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1. Meningkatkan angka kunjungan wisman dan wisnu	1.1 Meningkatkan promosi pariwisata	1.1.1	Melaksanakan promosi dengan mengikuti event-event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah	1.1.1.1 Meningkatkan pemasaran pariwisata 1.1.1.2 Memberikan bimbingan dan informasi tentang tata cara pengembangan Pariwisata
		1.1.2	Mengadakan Penyuluhan dan Menyebarkan buku sadar wisata dan sapta pesona di beberapa Kelurahan dan Kecamatan	1.1.1.3 Meningkatkan daya jual produk produk Unggulan di bidang pariwisata
		1.1.3	Mefasilitasi produk-produk pariwisata unggulan dalam mempromosikan	
Misi V : Peningkatan penyelenggaraan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian				



kepariwisataan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan	Meningkatkan pelayanan penyedia jasa kepariwisataan	1.1.1 Melaksanakan pelatihan dibidang Kepariwisataan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap kebudayaan dan pariwisata. 1.1.2 Meningkatkan kemitraan dengan pelaku Pariwisata. 1.1.3 Menciptakan regulasi pembinaan dan pengawasan iklim usaha di bidang Pariwisata yang berbasis Sapta pesona.	1.1.1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya Manusia guna meningkatkan Pelayanan di bidang kepariwisataan 1.1.1.2 Menjaga hubungan kem Dengan pelaku pariwisata Mebuat regulasi & pembinaar Pengawasan sehingga tercipt iklim Yangbaik dibidang pariwisata berbasis Sapta Pesona

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	INDIKATOR KNERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan terlindungi	BCB	1
2.	Jumlah Lingkungan seni/Kebudayaan yang aktif	Kelompok	143
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	400.000
4.	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	50

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam menjalankan program-program pada Tahun Anggaran 2015, maka program utama yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2015 dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

NO	URAIAN	TARGET KINERJA
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		
1	Pelaksanaan promosi Pariwisata Nusantara di dalam & luar negeri	6 Event
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

1	Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata	7 obyek wisata, 6 sarana obyek wisata
2	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	1 event
3	Pengembangan , sosialisasi dan penerapan serta pengawasan Standarisasi	300 orang, 1 Event
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN		
1	Pengembangan dan penguatan informasi Database	1 sistem informasi, 1 dokumen, 100 buah souvenir
2	Pelaksanaan koordinasi pembangunan Kemitraan Pariwisata	12 Kali Koordinasi
3	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	150 orang
PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH		
1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	46 orang, 4 event, 44 Pagelaran,
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		
1	Fasilitasi dan aktualisasi adat budaya Daerah	360 Orang, 4 event, 1 Pagelaran
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA		
1	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	360 Orang

2.2 PERJANJIAN

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya Penetapan Kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

**Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Lestariannya Bangunan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan Terlindung	BCB	1
2.	Berkembangnya Seni Budaya Daerah	Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif	Kelompok	143
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Mataram	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	450.000
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

4.	Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE	Hotel	108
		Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas	Hotel	13
5.	Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Mataram	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi Wisata	8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan dalam urusan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Mataram dalam Tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan.

Metode Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Relisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana tingkat pencapaian} = \frac{\text{Relisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	< 100 %	Tidak Tercapai
3.	= 100 %	Tercapai
4.	> 100 %	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada melebihi target. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada tidak tercapainya target. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian



kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1.1
Capaian Kinerja Tahun 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
Bedasarkan Renstra 2011-2015

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi	BCB	1	1	100
2.	Cakupan Gelar Seni dan Budaya	Kegiatan	52	52	100
3.	Jumlah Lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	143	143	100
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	450.000	427.725	86,82
5.	Jumlah Wisatawan Menginap	Orang	425.000	368,995	86,82
6.	Rata-Rata lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,3	115
7.	Jumlah Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang MICE	Hotel	108	108	100
8.	Jumlah Usaha Pariwisata Jasa Aomodasi Penunjang Mice yang berkualitas	Hotel	50	18	36
9.	Jumlah Destinisasi Wisata	Destinasi	8	8	100
10.	Jumlah Kelompok wisata yang dibina	Kelompok	50	35	70

Tabel 3.1.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR KNERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan terlindungi	BCB	1	1	100
2.	Jumlah Lingkungan seni/Kebudayaan yang aktif	Kelompok	143	143	100
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	450.000	427.725	86,82

Indikator Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan Terlindungi mencapai target dengan capaian 100%. Bahwa bangunan yang akan diusulkan perlindungan dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 90,00% milik swasta dan perorangan, dimana tidak semua masyarakat pemilik yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya intensifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan tersebut. Kendala lainnya bahwa keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan

tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota. Indikator Jumlah Lingkungan Seni/Budaya yang Aktif telah mencapai target dengan capaian 100,00%. Keberhasilan capaian target kinerja ini adalah telah diadakan pembinaan terhadap lingkungan-lingkungan seni budaya melalui Inventarisasi data Seni dan Budaya update Tahunan, monitoring dan legalitas Lingkungan Seni yang kesemuanya dilakukan dalam rangka Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni Tradisional.

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan tidak mencapai target dengan capaian 92,24 % tidak tercapainya target kinerja ini dikarenakan karena adanya kebijakan diawal tahun yang tidak memperbolehkan diadakannya rapat bagi Instansi pemerintah di Hotel sehingga banyak kegiatan yang berupa rapat dan konferensi yang dibatalkan sehingga kunjungan berkurang mengapa ini berpengaruh karena perkembangan pariwisata Kota Mataram sangat bergantung dengan adanya kegiatan MICE (Meeting, Conference dan event), upaya lain yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yaitu dengan :

- Intensifikasi promosi pariwisata Kota Mataram baik direct promotion maupun melalui media-media promosi lainnya.
- Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik wisata Kota Mataram.
- Mengadakan event-event atau penampilan atraksi budaya yang melibatkan tamu-tamu baik nasional maupun mancanegara.



Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Tahun 2015
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Realisasi	Capaian %
1.	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi Baik dan Terlindung	BCB	1	1	100
2.	Berkembangnya Seni Budaya Daerah	Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif	Kelompok	143	143	100
		Cakupan Gelar Seni dan Budaya	Kegiatan	62 X	62 X	100
3.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Mataram	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	450.000	427.725	86,82
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,3	2,3	100
4.	Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE	Hotel	108	108	100
		Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas	Hotel	13	13	100
5.	Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Mataram	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi Wisata	8	8	100

3.2 PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Perencanaan Strategis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 5 sasaran Urusan dengan 7 indikator kinerja.

Urusan	Sasaran 1	terdiri dari 1 indikator
	Sasaran 2	terdiri dari 1 indikator
	Sasaran 3	terdiri dari 2 indikator
	Sasaran 4	terdiri dari 2 indikator
	Sasaran 5	Terdiri dari 2 indikator

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan pada level sasaran dan indikator yang terkait langsung dengan urusan (sasaran 1-5).

Hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Mataram Tahun 2015

NO	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian	Capaian
1.	Tidak Ada Target	n/a	-
2.	Tidak Tercapai	< 100 %	1
3.	Tercapai	= 100 %	9
4.	Melebihi Target	100 %	3
Jumlah			13



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	JUMLAH INDIKATOR	RATA-RATA CAPAIAN	n/a	< 100	= 100	> 100
				Tidak Ada Target	Tidak tercapai	Tercapai	Melebihi Target
1	Sasaran 1						
	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya	1	100	-	-	√	-
2	Sasaran 2						
	Berkembangnya Seni Budaya Daerah	2	100	-	-	√	-
3.	Sasaran 3						
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	2	100,91	-	-	-	√
4	Sasaran 4						
	Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram	2	100	-	-	√	-
5	Sasaran 5						
	Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Mataram	1	100	-	-	√	-



Pencapaian realisasi 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran terhadap target pada setiap sasaran yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT CAPAIAN					
			MELEBIHI TARGET (> 100 %)		TERCAPAI (= 100 %)		TIDAK TERCAPAI (< 100 %)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1.	Sasaran 1	1	-	-	1	100	-	-
2.	Sasaran 2	2	-	-	1	100	-	-
3.	Sasaran 3	2	-	-	-	-	2	93,41
1	Sasaran 4	2	-	-	2	100	-	-
5	Sasaran 5	1	-	-	1	100	-	-
	Jumlah	8	2	-	5	-	-	-

Dari 5 (lima) sasaran dengan 8 (Delapan) indikator kinerja, kategori pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan misi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2015

NO	KATAGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
A.	Sasaran 1	1	100
1.	Melebihi Target	-	-
2.	Tercapai	2	100
3.	Tidak TerCapai	-	-

NO	KATAGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE
B.	Sasaran 2	1	100
1.	Melebihi Target	-	-
2.	Tercapai	1	100
3.	Tidak TerCapai	-	-
C.	Sasaran 3	2	93,41
1.	Melebihi Target	1	100
2.	Tercapai	-	-
3.	Tidak TerCapai	1	86,82
D.	Sasaran 4	2	100
1.	Melebihi Target	-	-
2.	Tercapai	2	100
3.	Tidak TerCapai	-	-
E.	Sasaran 5	1	100
1.	Melebihi Target	-	-
2.	Tercapai	1	100
3.	Tidak TerCapai	-	-

Tabel 3.2.5
Target dan Capaian SPM Bidang Seni dan Budaya Tahun 2014

NO	INDIKATOR SPM	TARGET	REALISASI	TARGET NASIONAL
1.	Cakupan Kajian Seni	15	3	50,00%
2.	Cakupan Fasilitas Seni	7	1	30,00 %
3.	Cakupan Gelar Seni	4	4	75,00 %
4.	Misi Kesenian	1	1	100,00 %
5.	Cakupan SDM Kesenian	8	6	25,00 %
6.	Cakupan Tempat Kesenian	2	1	100,00 %
7.	Cakupan Organisasi Kesenian	3	1	34,00 %

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing- masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran 1 Lestarnya Bangunan Cagar Budaya

Pencapaian sasaran 1 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.1
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Lestarnya Bangunan Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2014				TAHUN 2015			Tahun 2020
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Lestarnya Bangunan Cagar Budaya	BCB	100	99	99,00	1	1	100	7

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya menjadi sasaran dengan indikator jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam Kondisi baik dan terlindungi dengan target sebanyak 1 BCB, terealisasi 1 BCB dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 100 %.

Terdapat lima kriteria untuk memutuskan suatu bangunan masuk menjadi bangunan cagar budaya. Kriteria tersebut ditinjau dari nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan usia bangunan minimal 50 tahun. Cagar budaya golongan A memiliki minimal 4 kriteria, golongan B tiga kriteria, dan golongan C sebanyak dua kriteria.

Analisis pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan diantaranya adalah bahwa bangunan yang akan diusulkan perlindungan dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 50,00% milik swasta dan perorangan, dimana tidak semua masyarakat pemilik yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu upaya-upaya intensifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan tersebut. Kendala lainnya bahwa keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.3.2
Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan)	Realisasi	Output Program/ Kegiatan Yang Dighasilkan	Keterkaitan output Terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang Menunjang Pencapaian
1.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah	28.572.500,-	28.327.500	Undang-Undang Cagar Budaya Yang Disosialisasikan	-	√

➤ **Permasalahan dan Solusi**

• **Permasalahan**

1. Kurangnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar Budaya yang tidak paham dengan adanya Undang-Undang tentang Cagar Budaya.
2. Karena Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Undang-Undang Cagar Budaya Maka banyak Bangunan Cagar Budaya yang dirubah bentuknya atau dirobohkan.
3. Kurangnya Pemahaman Para Remaja tentang Cagar Budaya sehingga para remaja kurang ikut melestarikan Cagar Budaya yang ada.

• **Solusi**

1. Diadakanya sosialisasi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang Cagar Budaya.
2. Perlu adanya pendataan ulang terhadap Cagar Budaya yang ada di Kota Mataram

Sasaran 2

Berkembangnya Seni Budaya Daerah

Pencapaian sasaran 2 meliputi 1 (dua) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Berkembangnya Seni Budaya Daerah

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2014				TAHUN 2015			Tahun 2020
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Cakupan Gelar Seni dan Budaya	Pagelaran	62 x	62 x	100,00	52 x	52 x	100,00	100
2.	Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif	Kelompok	130	130	100,00	143	143	100,00	200
Rata-rata pencapaian								100,00	

Berkembangnya Seni Budaya Daerah menjadi sasaran dengan indikator jumlah Cakupan Gelar Seni target sebanyak 52 terealisasi 52 dan Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang Aktif dengan target sebanyak 143 terealisasi 143, dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %.

Perhitungan Cakupan gelar seni dan budaya dan jumlah lingkung seni / budaya yang aktif dihitung berdasarkan akumulasi cakupan gelar seni dan budaya dan jumlah lingkung seni / budaya yang aktif.

Wujud gelar seni dan budaya antara lain pertunjukan, pameran, festival, dan lomba. Pertunjukan kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil

karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing.

Tabel 3.3.4**Data Cakupan Gelar Seni dan Budaya**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pagelaran Seni Ruang Publik	39	
2.	Pagelaran Seni Festival	5	
3.	Pagelaran Seni Luar Daerah	4	
4.	Pagelaran Seni Bulan Citra Budaya	1	
5	Pagelaran Seni Dalam Propinsi	3	
TOTAL		52	

Lingkung/Sanggar seni yang terdaftar pada Bidang Seni Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram berjumlah 143 Kelompok seni dari total 6 Kecamatan yang ada di Kota Mataram. Eksistensi mereka dalam mendukung program Pemerintah Kota Mataram khususnya di bidang seni budaya patut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kota Mataram sebagai stake holder. Keberadaan lingkung seni sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram tetap berusaha memfasilitasi eksistensi berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung

pada Lingkung seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram mengkriterikan lingkung/sanggar seni yang disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram.

Keberhasilan pencapaian yang melebihi target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi masyarakat serta swasta yang tentunya dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga Pagelaran Seni Budaya dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap lingkung-lingkung seni budaya melalui Inventarisasi data Seni dan Budaya update Tahunan, monitoring dan legalitas Lingkung Seni yang kesemuanya dilakukan dalam rangka Pelestarian, Pengembangan Pemanfaatan Seni Tradisional. Data Lingkung Seni terlampir.

**Tabel 3.3.5
Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan)	Realisasi	Output Program/ Kegiatan Yang Dighasilkan	Keterkaitan output Terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang Menunjang Pencapaian
1.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal	1.974.625.000	1.889.932.000	Meningkatnya kesenian dan kebudayaan lokal daerah	√	-
2.	Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	186.200.000	166.450.000	Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni budaya lokal	√	-

Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan**

Masih dirasakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pagelaran kesenian dan Event

➤ **SOLUSI**

Kerjasama dan partisipasi masyarakat serta swasta yang dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga Pagelaran Seni Budaya dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan

Sasaran 3

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Pencapaian sasaran 3 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2014				TAHUN 2015			Tahun 2020
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	400.000	429.325	107,33	425.000	368.995	86,82	600.000
2	Rata-rata lama menginap	Hari	2	2	100	2,3	2,3	100	3
Rata-Rata Pencapaian								93,41	



Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kota Mataram, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, dan rata-rata lama tinggal wisatawan. Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 143,41%. Capaian indikator jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 429.325 orang atau 107,33% dari target wisatawan 400.000 orang. Realisasi capaian kunjungan wisatawan Tahun 2015 tidak mencapai target, dimana target kunjungan wisatawan pada 2015 sejumlah 425.000 orang tetapi hanya terealisasi 368.995 orang.

Indikator rata-rata lama tinggal wisatawan adalah indikator baru di tahun 2014 dengan terealisasi 2,3 hari atau 100,00% dari target 2,3 hari. Perhitungan Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan dihitung berdasarkan akumulasi jumlah kunjungan wisatawan ke kota Mataram bekerja sama dengan dinas/instansi terkait dan para pelaksana usaha Pariwisata (Hotel) serta perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder pariwisata dan warga masyarakat Kota Mataram.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.3.7
Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan)	Realisasi	Output Program/ Kegiatan Yang Dighasilkan	Keterkaitan output Terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang Menunjang Pencapaian
1.	Pengembangan Kemitraan	Pengembangan dan penguatan informasi database	166.525.500	158.030.000	Tersediannya data kepariwisataan dan Kebudayaan serta penguatan informasi	√	-
		Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	131.379.000	109.474.000	Terjalannya komunikasi antara Pemerintah dan Para Pelaku pariwisata	√	-
		Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	122.670.500	115.380.000	Tersediannya pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan para pelaku pariwisata	√	-
2.	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan LD	711.556.000	636.557.100	Terlaksananya promosi pariwisata ke Luar Negeri maupun Keluar daerah	√	-
3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	116.300.250	116.298.300	Tersediannya paket wisata unggulan	√	-

Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

- ❖ Promosi pariwisata Kota Mataram yang kurang maksimal



- ❖ Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik wisata Kota Mataram.
- ❖ Belum optimalnya Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

➤ **SOLUSI**

- ❖ Intensifikasi promosi pariwisata Kota Mataram baik direct promotion maupun melalui media-media promosi lainnya.
- ❖ Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam penataan infrastruktur Kota untuk mendukung daya Tarik wisata Kota Mataram.
- ❖ Pelaksanaan kerjasama promosi pariwisata dengan Kabupaten/Kota/Negara lain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Sasaran 4
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram

Pencapaian sasaran 4 meliputi 2 (dua) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2014				TAHUN 2015			Tahun 2020
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE	Hotel				108	108	100	150
2	Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas	Hotel				13	13	100	30
Rata-Rata Pencapaian								100	

Sasaran Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata di Kota Mataram, dapat dilihat dari 2 (dua) indikator.

Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 100,00%. Perhitungan Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE dan jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE yang berkualitas dihitung berdasarkan akumulasi jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi penunjang MICE. MICE merupakan kegiatan konvensi, perjalanan intensif dan pameran dalam industri pariwisata. Sedangkan apa yang dimaksud dengan MICE? MICE yang secara teknis merupakan singkatan dari Meeting, Incentive,

Conference, Exhibition, digolongkan ke dalam industri pariwisata. MICE bisa diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan: usaha jasa konvensi, perjalanan intensif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pada umumnya kegiatan konvensi berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata lain, seperti transportasi, akomodasi, hiburan, perjalanan pra- dan pasca-konferensi (pre-and post-conference tours). Kriteria Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang MICE yang Berkualitas adalah sebagai berikut :

- ❖ Fasilitas setiap ruangan meeting dilengkapi dengan fasilitas audio visual;
- ❖ Tersedianya fasilitas presentase terkini;
- ❖ Tersedianya fasilitas ballroom yang lengkap;
- ❖ Tersedianya fitur bisnis yang lengkap;
- ❖ Tersedianya makanan dan minuman yang sesuai dengan kelas meeting tertentu;
- ❖ Tersedianya meeting room dengan berbagai kapasitas (class room, round table room dan U Shape);
- ❖ Mengacu pada Sapta Pesona.

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.3.9
Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan)	Realisasi	Output Program/ Kegiatan Yang Dighasilkan	Keterkaitan output Terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang Menunjang Pencapaian
1.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standar Kepariwisataan	223.640.000	211.840.000	Tersedianya pelaku pariwisata yang berkualitas	√	-

Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Belum maksimalnya jumlah Usaha Pariwisata Jasa Akomodasi Penunjang MICE yang Berkualitas

➤ Solusi

Perlu diadakan monitoring dan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan MICE

Sasaran 5

Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata

Pencapaian sasaran 5 meliputi 1 (satu) indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 5
Berkembangnya Jasa Usaha Pariwisata

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2014				TAHUN 2015			Tahun 2020
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Jumlah Destinasi Wisata	Destinasi Wisata	13	13	100	16	16	100	35
Rata-Rata Pencapaian								100	

Sasaran Berkembangnya Obyek Daya Tarik Wisata Kota Mataram, dapat dilihat dari 1 (satu) indikator. Tingkat rata-rata capaian kinerja nyata indikator ini adalah sebesar 100,00%.

Perhitungan Jumlah Destinasi Wisata dihitung berdasarkan akumulasi jumlah Destinasi Wisata di Kota Mataram.

Destinasi wisata adalah tempat atau tujuan perorangan atau sekelompok orang guna untuk berwisata. Destinasi wisata ini memiliki tujuan untuk menarik para wisatawan mancanegara atau wisatawan nusantara agar dapat berkunjung ke Kota Mataram, sehingga dapat menaikkan tingkat kunjungan wisatawan dan dapat memberikan tambahan PAD bagi Kota Mataram.

Data Destinasi Wisata Kota Mataram sampai dengan Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.11
Tabel Jumlah Destinasi Wisata

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Ket
1	Ampenan	Ampenan Tengah Jl. Pabean	Taman Rekreasi Pantai Ampenan Pelabuhan Lama	- Wisata bahari - Sunset - Arena bermain dan olahraga	
		Kebon Sari Jl. Udayana	Taman Udayana Museum	- Taman rekreasi - Arena bermain dan olah raga - Wisata kuliner - Wisata Sejarah	
2	Cakranegara	Cakra Timur Jl. Selaparang	Pura Meru	- Wisata Religi - Wisata sejarah	- Berupa bangunan fisik dengan arsitektur asli kebudayaan Bali
		Mayura Jl. Selaparang	Taman Mayura	- Wisata budaya - Wisata sejarah - Taman rekreasi	- Bangunan bersejarah
3	Sandubaya	Jl. Raya Sandubaya	Pasar Mandalika	-Pasar Induk Tradisional	
		Cilinaya Jl. Panca Usaha	Makam Van Ham	- Wisata budaya - Taman sejarah	- Mon



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Ket
4	Mataram	Jl. Pejanggik	Mataram Mall	- Wisata belanja	- Pusat Souvenir
		Sayang-Sayang	Sentra Industri Kotak Antik Rungkang Jangkuk	- Pasar Seni	
		Mataram Barat Jl. Pejanggik	Taman Sangkareang	- Taman bermain dan olahraga	
5	Sekarbela	Kel. Punia	Mall Epicentrum	Wisata Belanja	- Makam Keramat
		Tanjung Karang Jl. Sultan Salahudin	Pantai Bangsal Tj. Karang	- Wisata bahari - Pemandangan Sunset/pantai - Arena bermain dan olahraga - Restoran / Karaoke - Shelter	
		Jl. Lingkar Selatan	Makam Loang Baloq	- Wisata budaya - Wisata sejarah	
			Taman Rekreasi Loang Baloq	- Taman Wisata	
		Karang Pule Jl. Sultan Kaharudin	Sentra Industri Kerajinan Mutiara, Emas, dan Perak	- Pusat Accesoris dan Souvenir	
	Pantai Penghulu Agung	- Wisata Bahari			

Program dan Kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran termaksud adalah :

Tabel 3.3.12
Tabel Program dan Kegiatan serta Penganggaran

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan)	Realisasi	Output Program/ Kegiatan Yang Dighasilkan	Keterkaitan output Terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang Menunjang Pencapaian
1.	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	511.140.000	509.553.000	Tersedianya pelaku pariwisata yang berkualitas	√	-

Permasalahan dan Solusi

➤ **Permasalahan**

Belum maksimalnya jumlah Destinasi Wisata yang berkualitas

➤ **Solusi**

Perlunya peningkatan pengembangan tempat-tempat bersejarah dan perlu adanya Kampung wisata sebagai destinasi pariwisata yang baru bagi Kota Mataram, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Mataram.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.850.384.226,- sedangkan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

realisasi anggaran mencapai Rp. 6.428.305.413 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,84 %.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Kota Mataram pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.1
REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MATARAM TAHUN 2015

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	A.1 Belanja Pegawai	1.859.086.976	1.769.030.697	95,16
B.	BELANJA LANGSUNG			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1.1. Penyediaan jasa surat menurut	2.250.000	2.163.000	96,13
	1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31.800.000	17.450.366	54,88
	1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.550.000	8.240.600	49,79
	1.4. Penyediaan alat tulis kantor	44.550.000	44.500.000	99,89
	1.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.250.000	25.100.000	73,28
	1.6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.00	4.320.000	96
	1.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	4.290.000	89,38
	1.9. Penyediaan makanan dan minuman	8.040.000	3.760.000	46,77
	1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000	91.799.000	76,50
	1.11. Penyusunan dokumen perencanaan	142.311.550	129.546.500	91,03
	1.12. Pengelolaan administrasi umum kepegawaian	11.000.000	8.395.000	76,32
	1.13. Penyediaan administrasi keuangan	93.156.000	91.906.000	98,66
	1.14 Penyediaan Komponen Instalasi	3.500.000	2.689.000	76,83



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

	Listrik penerangan Bangunan Kantor			
	1.15 Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	16.550.000	8.240.600	49,79
2	Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur			
	1.1. Pemeliharaan berkala gedung kantor	65.550.000	64.230.000	97,99
	1.2. Pengadaan peralatan gedung kantor	22.500.000	22.500.000	100
	1.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.387.000	63.323.500	81,83
	1.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.975.000	31.200.000	91,83
	1.5. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor	50.500.000	50.500.000	100
	1.6. Pengadaan Meubelair	16.000.000	16.000.000	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	17.150.000	17.150.000	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.			
	3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.918.950	18.369.850	97,10
5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
	c. Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	711.556.000	636.557.100	89,46
6	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
	5.1. Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	551.140.000	509.553.000	99,69
	5.2. Pengembangan Jenis Paket Wisata Unggulan	116.300.250	116.298.300	100
	5.3. Pengembangan , Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan	223.640.000	171.150.000	97,27
7	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
	6.1. Pengembangan dan penguatan informasi dan data base	166.525.500	158.030.000	94,90
	6.2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	131.379.000	109.474.000	83,33
	6.3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan	122.670.500	115.380.000	94,06
8	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah			
	7.1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1.974.625.000	1.889.932.000	95,71



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

9	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
	8.1 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	28.572.500	28.327.500	99,14
10	Program Pengembangan Nilai Budaya			
	9.1 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	186.200.000	166.450.000	89,39
	TOTAL BELANJA	6.850.384.226	6.428.305.413	93,84

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram pada tahun 2015.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, dapatdiketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.2
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

NO	Katagori	Jumlah Indiaktor	Persentase	Anggaran	
				Realisasai	%
A.	Sasaran 1	1	100	28.572.500	99,14
1.	Melebihi Target	-	-		
2.	Tercapai	1	100		
3.	Tidak TerCapai	-	-		
B.	Sasaran 2	1	100	2.056.382.000	95
1.	Melebihi Target	-	-		
2.	Tercapai	1	100		
3.	Tidak TerCapai	-	-		



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015

NO	Katagori	Jumlah Indiaktor	Persentase	Anggaran	
				Realisasai	%
C.	Sasaran 3	2	100,91	1.135.739.400	91
1.	Melebihi Target	1	115		
2.	Tercapai	-	-		
3.	Tidak TerCapai	1	86,82		
D.	Sasaran 4	2	100	211.480.000	95
1.	Melebihi Target	-	-		
2.	Tercapai	2	100		
3.	Tidak TerCapai	-	-		
E.	Sasaran 5	1	100	509.553.000	99,70
1.	Melebihi Target	-	-		
2.	Tercapai	1	100		
3.	Tidak TerCapai	1	100		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2015. Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Mataram.

Penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun 2015 menggambarkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram menetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan 8 (delapan) indicator kinerja berdasarkan revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2015. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi target tercapai

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi target tercapai

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 93,41% atau interpretasi target tidak tercapai

Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100,00% atau interpretasi target tercapai

Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100,00% atau interpretasi target tercapai

Berdasarkan hal di atas, semua indikator kinerja capaian kerjanya rata-rata tercapai yaitu 4 indikator yang mencapai target dan 1 indikator yang tercapai targetnya tidak tercapai.

Dalam Tahun Anggaran 2015, untuk pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut di atas, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.850.384.226 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.428.305.413 atau 93,84%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2015, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun mendatang.

